

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/		PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025		1	s.d	12	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan
		BULAN MULAI		BULAN AKHIR			

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

5101010502890002

2. Nama

RUDI DWI RAHMAWAN

3. Jenis ID

KTP

4. No. ID

5101010502890002

5. No. Telepon

087855790879

6. Email

udinggentong594@gmail.com

7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP Suami/Istri

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1

a

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)

2

15.324.758

b

1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

1

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c)

3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

15.324.758

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

15.324.758

5

Penghasilan tidak kena pajak

K/3 = 72.000.000

72.000.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

0

7

PPh terutang

0

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0

D. KREDIT PAJAK

10

a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

0

b

Angsuran PPh Pasal 25

0

c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

0

d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

NIK/NPWP

5101010502890002

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

2025

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11

a

PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)

0

b

Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

1

0

c

PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Ganti SPT Sebelumnya

12

a

PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

-

b

PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

-

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Nomor rekening

Nama bank

Nama pemilik rekening

1. Dikembalikan melalui pemeriksaan.
2. Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13

a

Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

2

0

b

Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

1

0

c

Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya?

1

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14

a

Harta pada akhir Tahun Pajak (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

4.000.000

b

Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?

1

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

1

0

e

Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?

1

f

Apakah Anda melaporkan biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?

1

g

Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?

1

h

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian.

0

(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

15

a

Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit

1

1. Tidak 2. Ya

b

Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

1

1. Tidak 2. Ya

c

Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

1

1. Tidak 2. Ya

d

Surat kuasa khusus

1

1. Tidak 2. Ya

e

Dokumen lainnya

1

1. Tidak 2. Ya

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

1

1. Wajib Pajak 2. Kuasa

Tanggal

20 Februari 2026

NIK/NPWP

5101010502890002

Tanda Tangan



Nama

RUDI DWI RAHMAWAN

Didandatangani secara elektronik



Uding Gentong <udinggentong594@gmail.com>

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: udinggentong594@gmail.com

20 Februari 2026 pukul 08.19



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-28579/CT/KPP.1708/2026
Tanggal	: 20 Februari 2026
NPWP	: 5101010502890002
Nama Wajib Pajak	: RUDI DWI RAHMAWAN
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 20 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.